

Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Merauke

Agung Hidayat *, Guntur Noerman Sanjaya **, H. Burhanuddin Yasin ***, dan Soekatmo **

* Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke

** Dosen Program Studi Keuangan dan Perbankan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke

*** Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 22 Desember 2024

Disetujui 21 Januari 2025

Keywords:

Strategi pemberdayaan
Pemberdayaan masyarakat
Kemiskinan

ABSTRAK

Abstract : *The purpose of this thesis is to provide recommendations for the development of better and sustainable policies in efforts to empower the community in reducing the poverty level in Merauke. The type and design of the research carried out using qualitative descriptive with the object of the research is secondary data taken from the Central Statistics Agency nationally while the sample is taken from the Central Statistics Agency of Merauke Regency, South Papua Province in 2024. The results of the study show that the community empowerment strategy in Merauke Regency has great potential to overcome poverty effectively. Through the identification of local resources, skill improvement, access to capital, infrastructure development, and institutional strengthening, communities can be empowered to achieve economic independence. An approach that involves active community participation and collaboration between stakeholders is key to success. With sustainable implementation, it is hoped that poverty can be reduced and the quality of life of the community will improve.*

Abstrak : Tujuan dari skripsi ini adalah memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Merauke. Jenis dan rancangan penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif dengan objek penelitian adalah data skunder yang di ambil dari Badan Pusat Statistik secara nasional sedangkan sampelnya di ambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke Propinsi Papua Selatan tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Merauke memiliki potensi besar untuk mengatasi kemiskinan secara efektif. Melalui identifikasi sumber daya lokal, peningkatan keterampilan, akses modal, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kelembagaan, masyarakat dapat diberdayakan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan. Dengan implementasi yang berkelanjutan, diharapkan kemiskinan dapat berkurang dan kualitas hidup masyarakat meningkat.

Open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Alamat Korespondensi :

Guntur Noerman Sanjaya

Dosen Program Studi Keuangan dan Perbankan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke

Jl. Noari, Karang Indah, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke

E-Mail : guntur.ns.ymtp@gmail.com

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia sebagian besar berada tinggal di perbatasan antara pedesaan dengan perkotaan. Masyarakat yang tinggal di daerah demikian sering disebut dengan masyarakat pinggiran (*suburb*). Masyarakat pinggiran sering diidentifikasi dengan masyarakat semimaju, semi modern, atau istilah sekarang lebih dikenal dengan penamaan masyarakat madani. Keadaan masyarakat pinggiran (*suburb*) memang bervariasi ada yang tergolong ekonomi kaya, namun ada juga yang tergolong ekonomi miskin. Hal

ini dapat terjadi karena letak geografis, mudahnya arus informasi, mudahnya transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemudahan dalam moda transportasi, baik transportasi umum maupun transportasi pribadi.

Di samping itu, tentu saja peran dari stakeholder dan keberadaan potensi sumber daya alam (SDA) serta sumber daya manusia (SDM) sangat dibutuhkan di sini (Hastuti & Setyawan, 2021). Tampaknya dan faktanya potensi-potensi tersebut sampai saat ini belum dikembangkan dan dikelola secara maksimal khususnya melalui pembinaan dan pengembangan, baik SDM, SDA, maupun pola atau sistem yang menunjang pembangunan pendidikan, ekonomi, atau kesehatan. Pembinaan dan pengembangan di daerah dapat terjadi melalui kesadaran diri manusianya (SDM daerah) dengan berpendidikan yang baik, juga peran dan fungsi stakeholder yang dilakukan di daerah itu baik pula (*good governance*). Tampaknya berbagai upaya peningkatan sudah dilakukan pihak terkait untuk meningkatkan mutu daerahnya. Sayangnya, upaya peningkatan tersebut belum terealisasi dengan baik khususnya peran serta masyarakat. Permasalahan sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketenteraman masyarakat sehingga diperlukan adanya tindakan nyata sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Permasalahan sosial dianggap sebagai sebuah persoalan, baik kecil maupun besar, karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum yang sifatnya dapat merusak suatu individu atau suatu kelompok tertentu. Penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelaah tanpa adanya pertimbangan ukuran-ukuran dari masyarakat mengenai apa yang dianggap buruk atau baik. Permasalahan sosial biasanya terjadi akibat adanya interaksi sosial antarindividu, antara individu dengan suatu kelompok, dan atau antara kelompok dengan kelompok lain. Adanya interaksi sosial tersebut biasanya berkisar pada nilai adat istiadat suatu daerah, ideologi, dan tradisi yang ditandai dengan adanya proses sosial yang disosiatif. Permasalahan sosial memang biasanya timbul akibat adanya perkembangan masyarakat, masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok sehingga terjadinya kekegatan budaya (*cultural shock*) dan atau kesenjangan budaya (*cultural lag*).

Kemiskinan di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan, tantangan yang dihadapi tetap besar. Menurut informasi Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun ada penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, masih ada jutaan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang layak. Strategi pemberdayaan masyarakat muncul sebagai solusi yang berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan komunitas.

Menurut data tahun 2024 yang beradal dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa Tingkat kemiskinan pada 38 provinsi di Indonesia terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan hal tersebut di karenakan adanya program-program pemberdayaan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Pemberdayaan tidak hanya sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi juga meliputi pengembangan keterampilan, akses terhadap sumber daya, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hak tersebut tentunya sangat membantu masyarakat dalam pengentasan kemiskinan yang sudah terjadi dari sejak dahulu.

Tabel 1 Presentasi Penduduk Miskin 38 Propinsi Di Indonesia

38 Provinsi	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah (%)					
	Perkotaan		Perdesaan		Jumlah	
	2024		2024		2024	
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
ACEH	9,6	-	16,75	-	14,23	-
SUMATERA UTARA	7,93	-	8,08	-	7,99	-
SUMATERA BARAT	4,72	-	7,28	-	5,97	-
RIAU	6,76	-	6,61	-	6,67	-
JAMBI	9,5	-	5,9	-	7,1	-
SUMATERA SELATAN	10,04	-	11,53	-	10,97	-
BENGKULU	13,56	-	13,56	-	13,56	-
LAMPUNG	8,18	-	11,97	-	10,69	-
KEP. BANGKA BELITUNG	3,39	-	6,17	-	4,55	-
KEP. RIAU	4,85	-	9,94	-	5,37	-
DKI JAKARTA	4,3	-	-	-	4,3	-
JAWA BARAT	7,07	-	9,07	-	7,46	-
JAWA TENGAH	9,71	-	11,34	-	10,47	-
DI YOGYAKARTA	10,29	-	12,49	-	10,83	-
JAWA TIMUR	7,12	-	13,3	-	9,79	-
BANTEN	5,69	-	6,44	-	5,84	-
BALI	3,55	-	5,2	-	4	-
NUSA TENGGARA BARAT	12,86	-	12,95	-	12,91	-
NUSA TENGGARA TIMUR	8,57	-	23,41	-	19,48	-
KALIMANTAN BARAT	4,25	-	7,58	-	6,32	-
KALIMANTAN TENGAH	4,89	-	5,38	-	5,17	-
KALIMANTAN SELATAN	3,62	-	4,61	-	4,11	-
KALIMANTAN TIMUR	4,47	-	8,76	-	5,78	-
KALIMANTAN UTARA	4,73	-	9,23	-	6,32	-
SULAWESI UTARA	4,75	-	10,35	-	7,25	-
SULAWESI TENGAH	8,61	-	13,33	-	11,77	-
SULAWESI SELATAN	5,08	-	10,74	-	8,06	-
SULAWESI TENGGARA	7,45	-	13,6	-	11,21	-
GORONTALO	4,57	-	22,97	-	14,57	-
SULAWESI BARAT	9,29	-	11,7	-	11,21	-
MALUKU	5,14	-	24,43	-	16,05	-
MALUKU UTARA	6,12	-	6,41	-	6,32	-
PAPUA BARAT	8,17	-	27,68	-	21,66	-
PAPUA BARAT DAYA	8,51	-	27,78	-	18,13	-
PAPUA	6,33	-	33,67	-	17,26	-
PAPUA SELATAN	3,1	-	25,64	-	17,44	-
PAPUA TENGAH	4,32	-	37,98	-	29,76	-
PAPUA PEGUNUNGAN	16,56	-	34,21	-	32,97	-
Jumlah	267,65		528,04		423,54	

Sumber Data diolah 2024

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa masih banyaknya penduduk miskin yang ada di setiap propinsi di Indonesia, jumlah penduduk miskin daerah perkotaan di 38 propinsi berjumlah 267,65%, sedangkan penduduk miskin di daerah pedesaan di 38 propinsi berjumlah 528,04% sehingga total penduduk miskin di 38 propinsi di Indonesia pada tri semester pertama adalah 423,54% hal tersebut menjadi tugas berat bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui program pemberdayaan.

Program-program pemberdayaan yang berbasis pada potensi lokal diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mandiri secara ekonomi dan sosial. Namun, implementasi strategi pemberdayaan di Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya, serta ketidakberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Selain itu,

faktor budaya dan struktur sosial juga berperan dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan. Dengan mempertimbangkan keragaman kondisi di setiap daerah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat diidentifikasi praktik terbaik dan hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan kebijakan dan program di masa depan. Pemberdayaan masyarakat yang efektif diharapkan dapat menjadi kunci dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Strategi pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada bantuan finansial, tetapi juga pada pengembangan kapasitas individu dan komunitas, peningkatan keterampilan, serta akses terhadap sumber daya. Melalui program-program pemberdayaan yang terintegrasi, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi mereka.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024 jumlah penduduk kabupaten merauke adalah 244.723, seperti yang terlihat dalam tabel 1.2 berikut :

Tabel 2 Jumlah Penduduk Merauke Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kimaam	2.771	2.671	5.442
Waan	1.200	1.005	2.205
Tabonji	1.612	1.476	3.088
Ilwayab	1.362	1.180	2.542
Okaba	2.135	2.036	4.171
Tubang	1.304	1.293	2.597
Ngguti	1.299	1.212	2.511
Kaptel	822	713	1.535
Kurik	8.734	8.119	16.853
Malind	5.529	5.255	10.784
Animha	1.250	1.106	2.356
Merauke	56.578	53.963	110.541
Semangga	8.773	8.045	16.818
Tanah miring	11.233	10.207	21.440
Jagebob	4.331	3.938	8.269
Sota	1.862	1.752	3.614
Naukenjerai	1.340	1.258	2.598
Muting	3.606	3.277	6.883
Eligobel	3.035	2.705	5.740
Ulilin	5.831	4.365	10.196
Kontuar	643	531	1.174
Padua	1.258	1.107	2.365
Kabupaten Merauke	126.508	117.214	243.722
Data diolah BPS 2024			

Begitu pula yang terjadi di Propinsi Papua Selatan data menunjukkan bahwa sebesar 3,1% penduduk kota dan 25,64% penduduk pedesaan berada dalam kemiskinan. Dengan jumlah kemiskinan sebanyak 17,44% membuat pemerintah daerah melakukan berbagai program pemberdayaan dan telah diluncurkan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Namun, implementasi dan dampaknya masih perlu dievaluasi untuk memastikan keberhasilan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Tantangan seperti kurangnya koordinasi antar partner, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran masyarakat terhadap program yang ada menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat yang telah diterapkan di Kabupaten Merauke, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan. Dengan memahami

konteks lokal dan tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan di daerah ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Merauke. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin menganalisis terkait “**Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Merauke**”.

Landasan Teori

Pengertian Strategi

Menurut Suprpto (2019) Suatu keberhasilan berkaitan dengan penggunaan strategi. Karena keberhasilan sebuah manajemen akan tergantung kepada strategi apa yang digunakan. Strategi berasal dari kata “*stratos*” dan “*agein*”. Dalam bahasa Yunani kuno *stratos* bermakna tentara. Sedangkan kata “*agein*” memiliki makna pemimpin. Sehingga apa yang dimaksud dengan strategi yaitu adalah memimpin tentara. Lalu ada istilah *strategos* yang artinya adalah memimpin tentara tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni berperang para jenderal atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan.

Menurut Karl von Clausewitz (1780-1831) dalam Cangara (2017) strategi dirumuskan sebagai suatu seni menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang. ada ungkapan “*to win the war, not to win the battle*” Yang dipahami dalam bahasa Indonesia memenangkan perang, bukan memenangkan pertempuran.

Jadi pentingnya satu strategi adalah memenangkan perang, sedangkan aktif adalah untuk memenangkan pertempuran.

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya.

Menurut Edi Suharto (2005) secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pemberdayaan menurut Suhendra (2006) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”.

Teori Pemberdayaan Masyarakat

Selama ini berkembang sejumlah teori pemberdayaan masyarakat. Namun, setidaknya terdapat 2 teori pemberdayaan masyarakat menurut ahli ilmu sosial yang penting untuk dicermati. Selain itu, ada juga 6 teori yang terkait dengan landasan konsep pemberdayaan masyarakat.

1. Teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Jim Ife

Dalam bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice* (1997), Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: *pluralis*, *elitis*, *strukturalis*, dan *post-strukturalis*.

Dalam buku Pengembangan Masyarakat karya Zubaedi (2013: 21-22), penjelasan dari 4 perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut.

Pertama, perspektif *pluralis* melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif.

Dalam perspektif *pluralis*, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah.

Kedua, perspektif *elitis* memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi

dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite.

Ketiga, perspektif *strukturalis* memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural.

Keempat, perspektif *Post-strukturalis* menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.

Jim Ife juga mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu adalah: kemampuan menentukan pilihan pribadi; kemampuan menentukan kebutuhan sendiri; kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses pada sumber daya ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan masyarakat dan ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, terdapat tiga strategi pemberdayaan yang bisa dilakukan. Ketiga strategi itu adalah:

- a. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif.
 - c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.
2. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Teori Actors

Salah satu perspektif yang kerap dipakai dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah teori Actors.

Dikutip dari artikel "*Teori Actors dalam Pemberdayaan Masyarakat*" oleh Karjuni Dt. Maani, dalam [Jurnal Demokrasi](#) (Vol X, No 1, 2011), teori actors dikemukakan Sarah Cook dan Steve Macaulay, dalam *Perfect Empowerment* (1996).

Dalam teori Actors, masyarakat dinilai sebagai subyek yang mampu melakukan perubahan apabila terlepas dari kendali yang kaku dan mendapatkan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka.

Cara pandang itu sesuai akronim Actors, yakni *authority* (wewenang); *confidence and competence* (percaya diri dan kompetensi); *trust* (kepercayaan); *opportunities* (kesempatan); *responsibilities* (tanggung jawab); dan *support* (dukungan).

Teori Actors mengarah pada pendelegasian secara sosial dan moral sejumlah aspek berikut:

- a. Mendorong ketabahan
- b. Mendelegasikan wewenang sosial
- c. Mengatur kinerja
- d. Mengembangkan organisasi
- e. Menawarkan kerja sama
- f. Berkomunikasi secara efisien
- g. Mendorong inovasi
- h. Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Teori yang ditawarkan Cook dan Macaulay menghasilkan perubahan yang terencana karena input yang digunakan sudah diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, output yang dihasilkan berdayaguna secara optimal.

Dalam kerangka kerja teori Actors, pemberdayaan dilakukan dengan menumbuhkan keberdayaan masyarakat yang didukung aspek internal dan eksternal. Sementara aktor dalam pemberdayaan adalah pemerintah atau organisasi non-pemerintah.

3. Enam Teori Terkait Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Dua teori di atas merumuskan model pemberdayaan masyarakat yang bisa diimplementasikan dan memuat sejumlah konsep teknis.

Di luar itu, terdapat pula enam teori dalam bentuk luas yang terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat karena menjelaskan pola-pola interaksi sosial.

Mengutip buku [modul sosiologi](#) terbitan Kemdikbud berjudul *Kenali Dirimu* (2020), berikut ini keenam teori tersebut:

- a) Teori Ketergantungan Kekuasaan (*power-dependency*)

- b) Teori Sistem (*The Social System*)
- c) Teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi)
- d) Teori Konflik
- e) Teori Mobilisasi Sumberdaya
- f) Teori Konstruktivisme.

Model Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah konsep multifaset yang mencakup berbagai dimensi seperti psikologis, sosial, ekonomi, dan politik. Untuk mengimplementasikan pemberdayaan secara efektif, berbagai model telah dikembangkan. Model-model ini memberikan kerangka kerja yang memungkinkan praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan dalam berbagai konteks.

a. Model Pemberdayaan Individu

1) Model *Self-Empowerment*

Model *self-empowerment* berfokus pada pengembangan diri dan kemandirian individu. Model ini menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran diri, membangun kepercayaan diri, dan memperkuat kemampuan individu untuk mengelola kehidupan mereka sendiri. Langkah-langkah dalam model ini biasanya mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan pribadi melalui refleksi diri dan pengambilan keputusan yang mandiri. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan *self-efficacy* individu, yaitu keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan mereka sendiri.

2) Model *Transformational Leadership*

Model kepemimpinan transformasional menekankan peran pemimpin sebagai agen perubahan yang memberdayakan pengikut mereka. Pemimpin dalam model ini tidak hanya mengarahkan atau mengontrol, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai potensi penuh mereka. Kepemimpinan transformasional melibatkan pengembangan visi yang jelas, komunikasi yang efektif, dukungan emosional, dan pembinaan keterampilan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan kesempatan bagi pengembangan pribadi dan profesional, pemimpin transformasional dapat memberdayakan individu untuk berkontribusi secara maksimal dalam organisasi atau komunitas mereka.

b. Model Pemberdayaan Komunitas

1) Model Partisipatif

Model partisipatif mengutamakan keterlibatan aktif komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip utama dari model ini adalah bahwa komunitas harus memiliki suara dan peran yang signifikan dalam menentukan kebijakan dan program yang mempengaruhi mereka. Metode yang sering digunakan dalam model ini termasuk forum diskusi, kelompok kerja, dan konsultasi publik. Dengan memfasilitasi partisipasi aktif, model ini bertujuan untuk membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan komunitas tentang isu-isu yang relevan.

2) Model *Bottom-Up*

Model *bottom-up* atau dari bawah ke atas adalah pendekatan yang menekankan inisiatif lokal dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Berbeda dengan pendekatan *top-down* yang sering dikendalikan oleh otoritas pusat, model *bottom-up* menghargai pengetahuan dan pengalaman lokal, serta mendorong inisiatif dari individu dan kelompok di tingkat dasar. Pendekatan ini sering digunakan dalam program pembangunan komunitas, di mana solusi yang diusulkan berasal dari masyarakat itu sendiri, dengan dukungan teknis dan sumber daya dari pihak eksternal. Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan spesifik komunitas.

c. Model Pemberdayaan Organisasi

1) Model Struktural

Model struktural berfokus pada restrukturisasi organisasi untuk memberdayakan karyawan. Pendekatan ini melibatkan perubahan dalam hierarki organisasi, desentralisasi keputusan, dan penciptaan mekanisme yang memungkinkan karyawan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu contoh dari model ini adalah penerapan struktur organisasi flat, di mana ada lebih sedikit lapisan manajemen dan karyawan memiliki lebih banyak kebebasan dan tanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Dengan mengurangi birokrasi dan meningkatkan partisipasi, model struktural bertujuan untuk meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan.

2) Model *Inklusif*

Model inklusif menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung inklusi dan partisipasi luas dalam organisasi. Ini mencakup kebijakan untuk mempromosikan keragaman, kesetaraan, dan inklusi, serta

langkah-langkah untuk mengurangi hambatan yang mungkin dihadapi oleh kelompok-kelompok terpinggirkan. Contoh dari model ini termasuk program mentoring untuk karyawan baru atau dari kelompok minoritas, pelatihan kesadaran bias, dan kebijakan fleksibilitas kerja. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, organisasi dapat memanfaatkan berbagai perspektif dan keterampilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan inovasi dan kinerja keseluruhan.

d. Model Pemberdayaan *Gender*

1) Model *Feminist*

Model *feminist* berfokus pada pemberdayaan berbasis gender dan kesetaraan. Model ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dengan meningkatkan akses perempuan ke sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan. Ini sering melibatkan upaya untuk mengubah norma sosial dan budaya yang membatasi peran dan potensi perempuan, serta mengadvokasi untuk kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Contoh dari pendekatan ini termasuk program pendidikan untuk perempuan, dukungan untuk kepemimpinan perempuan, dan kampanye untuk menghapus diskriminasi gender dalam berbagai sektor.

2) Model *Interseksionalitas*

Model *interseksionalitas* mengakui bahwa identitas individu dan pengalaman ketidakadilan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti ras, kelas, gender, dan orientasi seksual. Model ini menekankan perlunya pendekatan yang holistik dan menyeluruh untuk pemberdayaan, yang mempertimbangkan berbagai lapisan diskriminasi dan ketidakadilan yang mungkin dihadapi oleh individu. Dengan menggunakan lensa interseksionalitas, program pemberdayaan dapat dirancang untuk lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik individu dan kelompok yang beragam, dan mengatasi hambatan yang kompleks dan saling berkaitan.

Implementasi Pemberdayaan

Implementasi pemberdayaan melibatkan penerapan teori dan model pemberdayaan ke dalam praktik nyata. Hal ini mencakup strategi dan pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan kapasitas individu dan komunitas, serta mengatasi hambatan yang menghalangi proses pemberdayaan. Bagian ini akan menjelaskan beberapa strategi implementasi yang efektif, memberikan contoh studi kasus nyata, serta membahas tantangan dan hambatan yang sering dihadapi dalam upaya pemberdayaan.

a. Strategi dan Pendekatan

1) Pelatihan dan Pendidikan

Salah satu strategi paling umum untuk pemberdayaan adalah melalui pelatihan dan pendidikan. Program pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan dan mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Pendidikan formal dan informal dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari keterampilan teknis hingga pengembangan pribadi dan kepemimpinan.

2) Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif melibatkan komunitas dalam setiap langkah proses pengambilan keputusan. Ini memastikan bahwa solusi yang diusulkan relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara anggota komunitas. Pendekatan ini dapat diterapkan melalui berbagai metode, seperti lokakarya partisipatif, survei komunitas, dan forum diskusi.

3) Pendekatan *Bottom-Up*

Pendekatan *bottom-up* menekankan pentingnya inisiatif lokal dan pengambilan keputusan yang dimulai dari tingkat komunitas. Berbeda dengan pendekatan *top-down* yang dikendalikan oleh otoritas pusat, pendekatan *bottom-up* menghargai pengetahuan dan pengalaman lokal, serta mendorong partisipasi aktif dari individu dan kelompok di tingkat dasar.

Dampak Dan Manfaat Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki dampak yang luas dan mendalam bagi individu, komunitas, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak-dampak ini tidak hanya terlihat dalam peningkatan kualitas hidup, tetapi juga dalam perubahan struktural dan sosial yang lebih luas. Bagian ini akan menguraikan dampak dan manfaat pemberdayaan dalam berbagai dimensi, yaitu psikologis, sosial, ekonomi, dan politik, serta memberikan contoh konkret untuk mengilustrasikan dampak-dampak tersebut.

a. Dampak Psikologis

1) Peningkatan *Self-Efficacy*

Pemberdayaan meningkatkan *self-efficacy*, yaitu keyakinan individu bahwa mereka mampu mengatasi tantangan dan mencapai tujuan mereka. Ini adalah komponen penting dari kesehatan mental dan kesejahteraan. Individu yang merasa berdaya lebih cenderung memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri dan kehidupan mereka, serta lebih mampu mengatasi stres dan kesulitan.

- 2) Peningkatan Kepuasan Hidup
Individu yang merasa berdaya juga melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Mereka merasa lebih memiliki kontrol atas hidup mereka dan lebih mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka. Peningkatan kepuasan hidup ini berhubungan erat dengan kesehatan mental yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih tinggi.
- b. Dampak Sosial
 - 1) Peningkatan Partisipasi Komunitas
Pemberdayaan meningkatkan partisipasi komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan merasa berdaya, individu lebih cenderung terlibat dalam aktivitas komunitas, seperti pertemuan warga, proyek sukarela, dan kegiatan advokasi. Partisipasi aktif ini memperkuat kohesi sosial dan membangun solidaritas dalam komunitas.
 - 2) Penguatan Jaringan Sosial
Pemberdayaan juga memperkuat jaringan sosial individu dan komunitas. Dengan terlibat dalam kelompok-kelompok pemberdayaan, individu membangun hubungan yang saling mendukung dan memperluas jaringan mereka. Jaringan sosial yang kuat memberikan dukungan emosional, akses informasi, dan sumber daya yang lebih baik.
- c. Dampak Ekonomi
 - 1) Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Ekonomi
Pemberdayaan ekonomi berujung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi individu dan keluarga. Dengan akses ke pelatihan, kredit, dan sumber daya, individu dapat memulai atau memperluas usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.
 - 2) Pengurangan Kemiskinan
Dengan meningkatkan kemampuan ekonomi individu, pemberdayaan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Program pemberdayaan yang efektif membantu individu keluar dari lingkaran kemiskinan dengan memberikan alat dan sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan pendapatan yang berkelanjutan.
- d. Dampak Politik
 - 1) Peningkatan Partisipasi Politik
Pemberdayaan meningkatkan partisipasi politik dengan memberi individu pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk terlibat dalam proses politik. Individu yang merasa berdaya lebih cenderung untuk mendaftar sebagai pemilih, berpartisipasi dalam kampanye, dan mencalonkan diri untuk jabatan publik.
 - 2) Penguatan Advokasi dan Gerakan Sosial
Pemberdayaan juga memperkuat advokasi dan gerakan sosial. Individu dan kelompok yang merasa berdaya lebih mampu mengorganisir diri mereka, mengadvokasi hak-hak mereka, dan mempengaruhi kebijakan publik. Gerakan sosial yang kuat dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih luas dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi.

Pengertian Kemiskinan

Menurut Todaro (2011) Konsep kemiskinan yang digunakan BPS yaitu pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Seseorang dikatakan miskin apabila sering menderita kekurangan gizi dan tingkat kesehatan yang buruk, sedikit melek huruf atau buta huruf sama sekali, hidup di lingkungan yang buruk, kurang terwakili secara politis, dan berusaha memperoleh penghasilan yang minim disebut pertanian kecil dan marginal atau di daerah kumuh.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita per hari yang meliputi kebutuhan dasar makanan seperti karbohidrat, protein, sayur dan buah. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang pendidikan dan kesehatan. Jadi, seseorang dikatakan miskin jika rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Seseorang dikatakan miskin apabila pendapatannya kurang dari Rp 332.119,- per orang dalam satu bulan atau setara dengan Rp 11.000,- per hari (BPS). Jadi, seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya di bawah Rp 11.000,- per hari.

Namun, lain halnya dengan kriteria yang ditentukan World Bank. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari. Artinya yang dianggap miskin di dunia ini (di negara maupun individu) adalah yang memiliki pengeluaran kurang dari USD 1,25 per hari.

Dilihat dari kebijakan umum kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer meliputi miskin akan aset, organisasi sosial, pengetahuan serta keterampilan. Sementara aspek sekunder meliputi miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Konstruksi

kemiskinan tersebut terwujud dalam bentuk kekurangan gizi, air bersih, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Indikator Kemiskinan

Terdapat beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Menurut Lincolin Arsyad (2016), ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan.

1) Tingkat konsumsi beras.

Tingkat konsumsi beras per kapita yang digunakan sebagai indikator kemiskinan. Bagi daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240kg per kapita per tahun dapat digolongkan sebagai penduduk miskin. Bagi daerah perkotaan sebesar 360 kg per kapita per tahun.

2) Tingkat pendapatan

Mengukur kemiskinan dapat pula dilakukan dengan melihat distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat dikatakan terjadinya ketimpangan pendapatan.

Todaro (2011: 253) membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan yaitu distribusi pendapatan perseorangan dan distribusi pendapatan fungsional. Distribusi pendapatan perseorangan yang biasanya digunakan sebagai ukuran langsung untuk menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Yang perlu diperhatikan yaitu seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang tidak peduli dari mana sumber penghasilannya. Oleh karena itu, para ekonom dan ahli statistik menghitung jumlah pendapatan semua individu kemudian membagi total populasi menjadi sejumlah kelompok atau ukuran.

3) Indikator kesejahteraan rakyat.

Pada salah satu publikasi PBB pada tahun 1961 yang berjudul *International Definition and Measurement of Levels of Living: An Interim Guide* dikemukakan bahwa terdapat Sembilan komponen yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan. Kesembilan komponen tersebut meliputi kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.

4) Indeks Kemiskinan Manusia

Lincolin Arsyad (2016) menambahkan indikator lain untuk mengukur tingkat kemiskinan masyarakat di suatu wilayah dengan menggunakan Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index). Menurut UNDP (United Nations Development Program) terdapat tiga nilai pokok yang menentukan tingkat kemiskinan yaitu tingkat kehidupan, tingkat pendidikan dasar dan tingkat kemapanan ekonomi

Faktor Penyebab Kemiskinan

Apabila dipandang dari sisi ekonomi, Sharp dalam Kuncoro (2003) menyatakan penyebab kemiskinan dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang;
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia;
- 3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Metode Analisis Data

Dalam melakukan penelitian yang menggunakan proses metode analisis deskriptif memiliki beberapa langkah yang dapat diikuti, antara lain:

1. Melakukan perumusan masalah
2. Menentukan jenis informasi atau data
3. Menentukan prosedur pengumpulan data
4. Melakukan pengolahan data di sajikan dalam betik table dan grafik
5. Melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data

Analisis Data

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2011-2023

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penduduk miskin di kabupaten merauke tahun 2011-2023 adalah sebagai berikut :

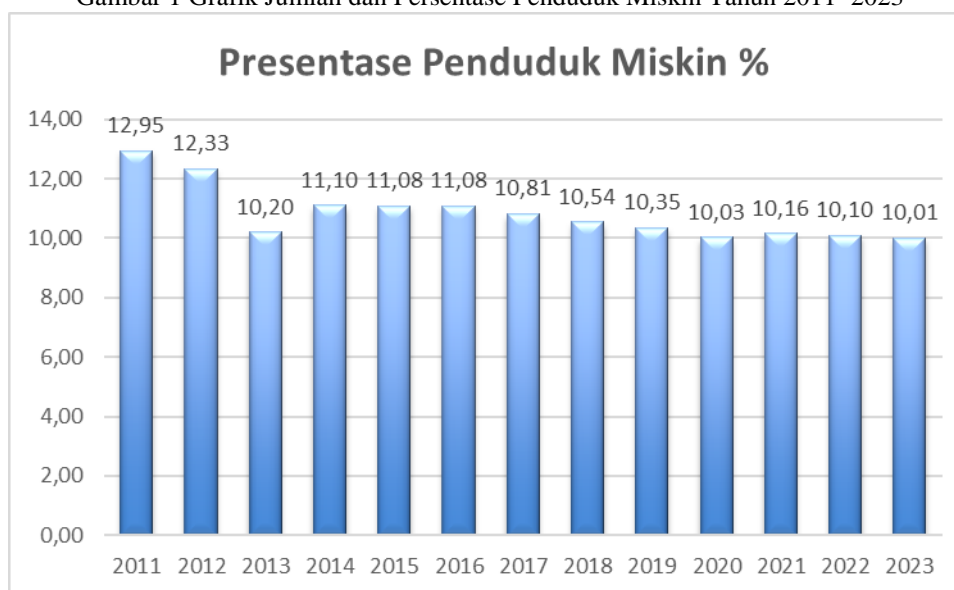
Tabel 3 Penduduk Miskin Di kabupaten Merauke Tahun 2011-2023

No	Tahun	Presentase Penduduk Miskin %	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Garis Kemiskinan (Rupiah)
1	2011	12,95	26,79	253.987
2	2012	12,33	26,00	261.300
3	2013	10,20	21,87	275.008
4	2014	11,10	23,96	294.257
5	2015	11,08	24,28	310.420
6	2016	11,08	24,06	342.842
7	2017	10,81	24,06	342.842
8	2018	10,54	23,72	345.965
9	2019	10,35	23,49	345.965
10	2020	10,03	23,49	346.502
11	2021	10,16	22,89	366.296
12	2022	10,10	23,83	387.443
13	2023	10,01	24,03	434.596

Sumber data diolah tahun 2024

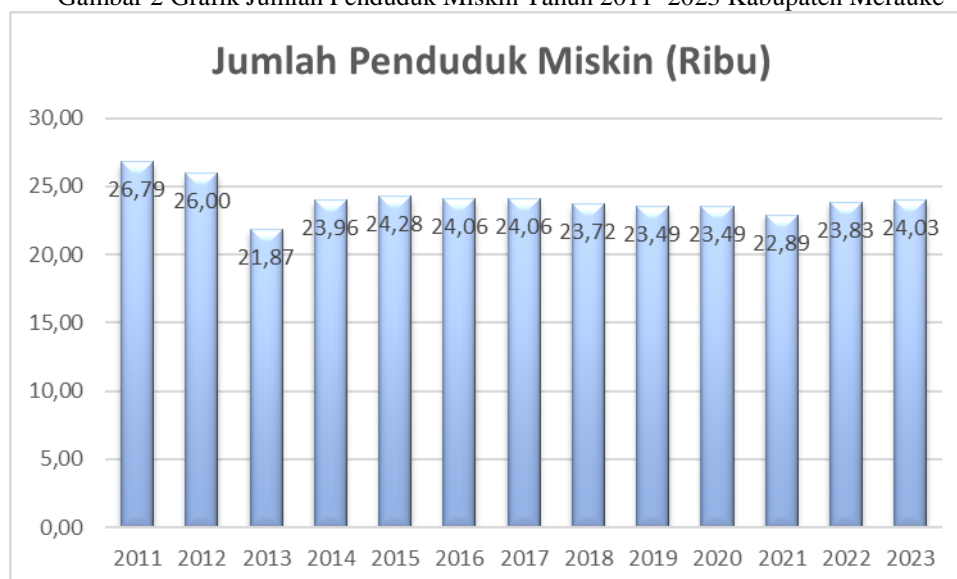
Secara umum, pada periode 2011–2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Merauke mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada tahun 2015 dan tahun 2021. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2021 yaitu sebesar 10,16% disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan 2011 sampai dengan 2023 disajikan pada Gambar berikut ini :

Gambar 1 Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2011–2023



Pada di atas jumlah penduduk miskin di Merauke pada 2023 mencapai 24,03 ribu orang. Dibandingkan pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 0,09 juta orang. Persentase penduduk miskin pada 2021 tercatat sebesar 10,16 persen, meningkat 0,13 persen poin terhadap 2020.

Gambar 2 Grafik Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2011–2023 Kabupaten Merauke



Pada Gambar 2 jumlah penduduk miskin di Merauke pada 2023 mencapai 24,03 ribu orang. Dibandingkan pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin meningkat 0,94 juta orang pada tahun 2022. Persentase penduduk miskin pada 2023 tercatat sebesar 10,01 persen, naik 0,20 persen poin terhadap 2022.

Perkembangan Garis Kemiskinan Tahun 2011-2023

Garis kemiskinan adalah batasan yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan dalam suatu masyarakat. Garis ini biasanya ditetapkan berdasarkan penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Individu atau keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan dianggap hidup dalam kondisi miskin, sehingga mereka mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Garis kemiskinan dapat berbeda-beda antara negara atau wilayah, tergantung pada biaya hidup dan standar yang berlaku.

Tabel 4 Garis Kemiskinan Tahun 2011–2023 Kabupaten Merauke

No	Presentase Penduduk Miskin %	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Prosentase (%)
1	12,95	26,79	253.987	5,90%
2	12,33	26,00	261.300	6,07%
3	10,20	21,87	275.008	6,38%
4	11,10	23,96	294.257	6,83%
5	11,08	24,28	310.420	7,21%
6	11,08	24,06	342.842	7,96%
7	10,81	24,06	342.842	7,96%
8	10,54	23,72	345.965	8,03%
9	10,35	23,49	345.965	8,03%
10	10,03	23,49	346.502	8,04%
11	10,16	22,89	366.296	8,50%
12	10,10	23,83	387.443	8,99%
13	10,01	24,03	434.596	10,09%
Jumlah			4.307.423	100,00%
Sumber data diolah tahun 2024				

Table 4 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada tahun 2011 sampai dengan 2021. Garis Kemiskinan pada 2023 adalah sebesar Rp.434.596,- per kapita per bulan. Dibandingkan tahun 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,09% persen.

Secara garis besar ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode tahun 2011-2023 antara lain adalah:

- a. Akses terhadap Pendidikan
Tingkat pendidikan yang rendah membatasi peluang kerja dan penghasilan masyarakat, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan.
- b. Kesempatan Kerja
Keterbatasan lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengangguran membuat banyak individu tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil.
- c. Infrastruktur yang Tidak Memadai
Kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih, menghambat kegiatan ekonomi dan meningkatkan biaya hidup.
- d. Sumber Daya Alam
Ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas atau tidak dikelola secara berkelanjutan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bagi masyarakat.
- e. Kesehatan Masyarakat
Tingkat kesehatan yang rendah mempengaruhi produktivitas dan kemampuan masyarakat untuk bekerja, sehingga berdampak pada pendapatan.
- f. Struktur Sosial dan Keluarga
Dinamika keluarga dan struktur sosial dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan dukungan dalam mengatasi masalah ekonomi.
- g. Kebijakan Pemerintah
Kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan oleh pemerintah setempat dapat mempengaruhi distribusi sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
- h. Budaya dan Tradisi
Nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir serta sikap terhadap pendidikan, kerja, dan inovasi.
- i. Ketidakstabilan Ekonomi
Fluktuasi harga barang dan kebutuhan pokok dapat memengaruhi daya beli masyarakat, sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan.
- j. Perubahan Iklim dan Bencana Alam:
Wilayah yang rentan terhadap bencana alam dan perubahan iklim dapat mengalami kerugian ekonomi yang signifikan, mempengaruhi mata pencaharian masyarakat.

Dengan memahami faktor-faktor ini, upaya untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Merauke dapat lebih terarah dan efektif.

Untuk periode tahun 2020–2021 di tambah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mempengaruhi angka kemiskinan di kabupaten Merauke.

Hasil dan Pembahasan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Dengan data kemiskinan yang sudah di paparkan di atas maka dibutuhkan berbagai Upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan ini salah satunya melalui meningkatkan fungsi pemberdayaan masyarakat di kabupaten merauke yang dilakukan oleh pemerintah.

Adapun fungsi pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Merauke dengan cara :

1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Pemberdayaan masyarakat membantu individu dan kelompok untuk mengembangkan usaha mandiri, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.
2. Pengembangan Keterampilan
Melalui pelatihan dan pendidikan, masyarakat dapat memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau menjalankan usaha.

3. Penguatan Jaringan Sosial
Pemberdayaan mendorong terbentuknya kelompok atau komunitas yang saling mendukung, sehingga masyarakat dapat berbagi informasi, sumber daya, dan pengalaman dalam mengatasi tantangan ekonomi.
4. Akses terhadap Sumber Daya
Masyarakat yang diberdayakan lebih mampu mengakses sumber daya, seperti modal, teknologi, dan informasi, yang diperlukan untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan produktivitas.
5. Peningkatan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
Pemberdayaan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
6. Meningkatkan Kualitas Hidup
Dengan mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan, masyarakat dapat menikmati peningkatan kualitas hidup, seperti akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.
7. Mendorong Inovasi dan Kreativitas
Masyarakat yang diberdayakan cenderung lebih inovatif dalam mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi, termasuk dalam hal pengembangan produk dan layanan baru.
8. Memperkuat Ketahanan Sosial
Pemberdayaan membantu menciptakan masyarakat yang lebih resilient, mampu menghadapi berbagai tantangan, baik ekonomi maupun sosial, yang mungkin muncul di masa depan.
9. Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan
Pemberdayaan juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan pentingnya pendidikan, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.
10. Pembangunan Berkelanjutan
Dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, pemberdayaan masyarakat mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi generasi mendatang.

Melalui fungsi-fungsi tersebut, pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Merauke dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Adapun Strategi pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan di kabupaten Merauke adalah

- a. Identifikasi Sumber Daya Lokal
Penggalian potensi sumber daya alam dan budaya di Kabupaten Merauke, seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan, yang dapat dijadikan basis ekonomi masyarakat.
- b. Pendidikan dan Pelatihan
Implementasi program pelatihan keterampilan yang relevan, seperti pertanian modern, manajemen usaha, dan pemasaran produk lokal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam menghasilkan dan memasarkan produk.
- c. Pemberian Modal Usaha
Penyediaan akses terhadap modal usaha bagi kelompok masyarakat, melalui skema pinjaman lunak atau hibah untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- d. Peningkatan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, pasar, dan fasilitas pendidikan, untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas masyarakat.
- e. Penguatan Kelembagaan
Pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok usaha yang dapat memfasilitasi kerjasama antar anggota, serta mengembangkan jaringan pemasaran yang lebih luas.
- f. Program Sosial dan Kesehatan
Penyediaan program kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, guna meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Strategi pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Merauke memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pembahasan:

- a. Pendekatan Partisipatif
Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan sangat penting. Keterlibatan ini memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

- b. Kolaborasi Multi-Stakeholder
Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan organisasi non-pemerintah (LSM) dapat memperkuat program pemberdayaan. Setiap pihak dapat memberikan sumber daya, pengetahuan, dan jaringan yang diperlukan untuk keberhasilan program.
- c. Keberlanjutan Ekonomi
Program pemberdayaan yang fokus pada pengembangan ekonomi lokal tidak hanya akan mengurangi kemiskinan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Masyarakat harus diberdayakan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif.
- d. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang mandiri. Program pendidikan harus mencakup tidak hanya keterampilan teknis tetapi juga pelatihan kewirausahaan.
- e. Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan program harus disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi yang baik, untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Umpan balik dari masyarakat sangat berharga untuk perbaikan program.

Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, diharapkan Kabupaten Merauke dapat mengatasi kemiskinan secara efektif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.

Kesimpulan

Strategi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Merauke memiliki potensi besar untuk mengatasi kemiskinan secara efektif. Melalui identifikasi sumber daya lokal, peningkatan keterampilan, akses modal, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kelembagaan, masyarakat dapat diberdayakan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan. Dengan implementasi yang berkelanjutan, diharapkan kemiskinan dapat berkurang dan kualitas hidup masyarakat meningkat.

Daftar Pustaka

- Abu Huraerah. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora
- Arsyad, Lincoln. 2016. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Atma Ras (2013), Analisis Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Socius. Volume 14.
- [Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](http://bps.go.id)
- A.W. Widjaja. 2003. Otonomi Desa. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada
- Cangara, H. (2017) Perencanaan dan Strategi Komunikasi, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hastuti, S. W. M., & Setyawan, W. (2021). Community Service in Study Potential Technology of Education Tour and Business Prospects of Traders in Tulungagung. Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 134–144.
- Ife, Jim, "Community Development, Creating Community Alternatives Vision, Analisis and Practice, 1997.
- Ife, Jim dan Tesoriero F. (2006). Community Development: Community Based Alternatives in an Age of Globalisation. Franches Forest NSW 2086: Pearson Education Australia Pty Ltd.
- K, Suhendra. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta
- Lincoln, Arsyad. 2016. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Moh Ali Aiz. dkk. 2005, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- [Modul Sosiologi](#). 2020, *Kenali Dirimu* terbitan Kemdikbud, Jakarta.
- Margolang, N. (2018) 'Pemberdayaan Masyarakat', Dedikasi: Journal of Community Engagment, 1(2/Jul).
- Murdiyana dan Mulyana. 2017, Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, Jurnal Politik Pemerintahan, Volume 10 No. 1.
- Karjuni Dt Maani. 2011, *Teori Actors dalam Pemberdayaan Masyarakat*" dalam [Jurnal Demokrasi](#) Vol X, No 1.
- Sharp (1996) dalam Kuncoro. 2003. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Suprpto, T. (2019) Pemberdayaan Masyarakat Informasi: Konsep Dan Aplikasi. I.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama

Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* :Penerbit CV. Citra Utama, Jakarta

Syafi'i Antonio. 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cetakan pertama Jakarta: GemaInsani, hal: 153-157.

Todaro, M.P. and Smith, S.C. (2011) *Economic Development*. 11th Edition, Prentice Hall, Harlow.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*. (Jakarta: Pustaka Kencana Prenada Media Group).

Internet :

<https://tirto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu>

https://an-nur.ac.id/teori-dan-model-pemberdayaan/#4_Model_Pemberdayaan